

# 十四届全国人大一次会议 记者会

Press Conference for the First Session of the 14<sup>th</sup> National People's Congress



## KONFERENSI PERS KEBIJAKAN LUAR NEGERI TIONGGOK

Menteri Luar Negeri Tiongkok Qin Gang (kedua kiri, belakang) menghadiri konferensi pers tentang kebijakan luar negeri dan hubungan luar negeri Tiongkok, di sela-sela sesi pertama Kongres Rakyat Nasional (NPC) ke-14, di Beijing, Tiongkok, Selasa (7/3).

## Tentara Myanmar Kembali Bunuh Puluhan Warga Sipil

Selain membunuh, tentara Myanmar juga memperkosa para wanita di desa tersebut.

**NAYPYIDAW (IM)** - Tentara Myanmar menyerang beberapa desa, memperkosa, memenggal dan membunuh sedikitnya 17 orang. Pengakuan ini menambah daftar apa yang kritikus sebut kejahatan perang yang terjadi sejak militer merebut kekuasaan dua tahun yang lalu.

Seorang anggota gerakan perlawanan anti-pemerintah dan seorang warga yang kehilangan istrinya mengatakan pekan lalu ditemukan 17 jenazah di Desa Nyaung Yin dan Tar Taing yang juga dikenal Tatai di wilayah Sagaing, Myanmar tengah.

Mereka mengatakan para korban ditahan militer dan di beberapa kasus tampaknya disiksa sebelum dibunuh.

Sejak militer merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari 2021 lalu Myanmar dilanda gejolak. Pasukan keamanan menggunakan kekerasan untuk menghentikan unjuk rasa damai di seluruh

negara. Kekerasan itu memicu perlawanan bersenjata yang pakar PBB kategorikan dalam perang sipil.

Tentara menggelar serangan besar-besaran ke banyak desa termasuk membakar desa dan memaksa ribuan orang mengungsi dari rumah mereka. Militer Myanmar menghadapi perlawanan terkuat di Sagaing, jantung historis Myanmar.

Ketua Pasukan Pertahanan Rakyat dan media independen Myanmar mengatakan serangan pekan lalu melibatkan tentara yang terdiri dari lebih dari 90 orang yang dibawa ke daerah itu dengan lima helikopter pada 23 Februari lalu.

Mereka mengatakan jenazah 14 orang termasuk tiga perempuan ditemukan di pulau kecil di sungai di Nyaung Yin pada Kamis (2/3) lalu. Tiga korban pria lainnya ditemukan di Tar Taing, termasuk dua anggota gerakan perlawanan. Mereka mengatakan satu orang dimutilasi, kepalanya dipenggal.

Desa-desa tetangga terletak sekitar 45 kilometer di sebelah barat Kota Mandalay. Warga Tar Taing, Moe Kyaw selamat dari serangan itu tapi istrinya Pan Thwal dan keponakannya yang berusia 18 tahun merupakan korban pembunuhan.

Saat dihubungi Jumat (3/3) lalu ia mengatakan pada Rabu (1/3) tengah malam tentara menahan 70 warga desa. Para tentara melepaskan tembakan ke udara saat mereka membawa para sandera dari rumah mereka ke kuil Budha setempat.

Moe Kyaw mengatakan para tentara mencuri bir dan barang-barang lain dari toko kecil bibinya. Saat tentara memukuli bibinya, Moe Kyaw melarikan diri dari dua tentara yang menemukannya.

Ia mengatakan istrinya dan warga desa lain disiksa di kuil Budha dan membawa keluar mereka dari desa sebagai sandera. Ia mengatakan istrinya dan dua perempuan lain dipukul, diperkosa dan ditembak di kepala oleh para tentara yang juga mencuri perhiasan istrinya.

Dua putranya yang berusia 11 dan 9 tahun dilepaskan saat para tentara pergi. Moe Kyaw tidak menjelaskan

bagaimana ia mengetahui nasib istrinya.

Pemerintah bawah tanah Myanmar, National Unity Government yang mengaku sebagai pemerintah sah negara itu menggelar konferensi pers daring pada Selasa (7/3). Mereka mengatakan tentara yang menyerang desa-desa dari Divisi Infanteri Ringan ke-99 yang berkemah di Wilayah Mandalay.

Pemimpin kelompok perlawanan di Sagaing mengatakan kelompoknya menyerang pasukan pemerintah. Tapi gagal menyelamatkan warga desa yang disandera.

Ketua kelompok itu mengatakan kelompoknya mendatangi pulau kecil di mana tentara membawa 20 warga desa. Di sana mereka menemukan 14 jenazah di tiga lokasi. Ia meminta namanya tidak disebutkan karena khawatir dengan aksi balasan dari militer.

Ia mengaku tidak melihat pembunuhannya tapi ia yakin para perempuan diperkosa. Media independen Myanmar melaporkan insiden sebelumnya melibatkan unit tentara

yang sama.

Dua anak berusia 12 dan 13 tahun yang membantu Pasukan Pertahanan Rakyat ditangkap pasukan pemerintah pada 26 Februari lalu dan dipenggal setelah dipaksa memberitahu lokasi perkemahan kelompok perlawanan itu. Foto-foto jenazah mereka yang ditemukan di desa Kan Daw, sekitar 12 kilometer dari Tar Taing menyebar di media sosial.

Kelompok yang berbeda, Pasukan Pertahanan Rakyat Cepat Sadaung mengatakan dua anggota mereka yang masih remaja juga dibunuh dan dipenggal dalam pertempuran di Kan Daw di hari yang sama. Pemerintah militer Myanmar tidak menanggapi tuduhan tersebut.

Sebelumnya militer membantah melakukan penyiksaan dan mengatakan korban jiwa merupakan gerilyawan pasukan bersenjata anti-pemerintah. Media daring yang mendukung militer mengungkapkan klaim serupa mengenai insiden di Sagaing atau menyatakannya sebagai hasil pertikaian antara faksi di kelompok perlawanan bersenjata. **tom**

## Mahathir Sebut Malaysia Bisa Seperti Singapura Bila PM Bukan Orang Melayu

**KUALA LUMPUR (IM)** - Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad mengatakan orang Melayu dapat kehilangan pengaruh politik di negaranya sendiri seperti Singapura bila perdana menteri (PM) bukan orang Melayu. Hal ini ia sampaikan dalam dialog di Putrajaya bersama politisi lainnya.

“Sudah sejak lama orang Melayu kehilangan kendali ekonomi di Malaysia, kini mereka beresiko kehilangan pengaruh politik juga,” katanya, seperti dikutip Straits Times, Selasa (7/3).

Mahathir mengatakan Malaysia dapat menjadi seperti Singapura dalam dua pemilihan berikutnya. Ia mengatakan kemungkinan ini dengan klaim tanpa dasar pemerintah saat ini dapat mendefinisikan ulang batas-batas elektoral yang membatasi konstituen Melayu. “Sampai batas tertentu, situasi ini akan mengubah pola pemerintahan yang ada di Pemilihan Umum ke-16, dan situasinya akan semakin buruk di Pemilihan Umum ke-17,” katanya merujuk dua pemilihan umum yang digelar dalam satu dekade ke depan.

“Tidak ada jaminan perdana menteri orang Melayu karena semua orang bisa menjadi perdana menteri, bahkan sekarang partai-partai Melayu di pemerintah tidak berkuasa dan mereka terpecah menjadi tiga partai,” kata Mahathir. “Saya yakin bila kami tidak berhati-hati, dalam pe-

milihan berikutnya dan bila suara dibagi, kami akan memilih orang yang tidak baik dan akan menggadaikan negara kami,” tambah Mahathir.

Dua pembicara lain di Program Mini Townhall Dialog Sepentasi Perjuangan Yang Hilang di Yayasan Kepimpinan Perdana, Putrajaya, itu adalah dua mantan menteri. Tan Sri Noh Omar yang dipecat dari Partai Umno pada Januari lalu dan Datuk Zuraida Kamaruddin yang kalah dalam pemilihan umum ke-15 tahun lalu.

Mahathir yang berusia 97 tahun kini aktif memperjuangkan hak-hak bumiputera atau orang Melayu di Malaysia. Ia mengatakan “tantangan utamanya adalah mempersatukan orang Melayu, partai-partainya dan organisasi-organisasinya.” Beberapa orang menanggapi dengan sinis peringatan Mahathir tersebut.

“Singapura memiliki internet yang lebih cepat, gaji yang lebih baik, transportasi umum yang lebih baik, aturan kepemilikan mobil yang lebih ketat, lalu mengapa, mengapa kami tidak bisa seperti Singapura, Mahathir?” kata jurnalis Erna Mahyuni.

Mahathir juga mengatakan persatuan Malaysia gagal membawa perubahan besar bagi rakyat. Menurutnya Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak memberikan dampak bagi Malaysia di 100 hari pertamanya menjabat. **gul**

## PBB: Persekusi Taliban Pada Perempuan Merupakan Kejahatan Kemanusiaan

**JENEWA (IM)** - Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB mengatakan perlakuan Taliban pada perempuan Afghanistan dapat dikategorikan kejahatan pada kemanusiaan. Sejak berkuasa Agustus 2021 lalu Taliban menekan kebebasan dan hak-hak perempuan seperti melarang mereka datang ke sekolah dan universitas.

Dalam laporannya dari bulan Juli sampai Desember 2022, Pelapor Khusus PBB di Afghanistan, Richard Bennett mengatakan perlakuan Taliban pada kebebasan dan hak perempuan “mungkin termasuk persekusi gender, kejahatan terhadap kemanusiaan.”

“Kebijakan Taliban yang disengaja dan diperhitungkan dalam menolak hak asasi perempuan dan menyingkirkan mereka dari kehidupan publik, mungkin merupakan persekusi perempuan yang masuk dalam kejahatan internasional yang mana pihak berwenang dapat dimintai pertanggung jawaban,” kata Bennett pada Dewan HAM PBB, Senin (6/3).

Sebelumnya Taliban juga pernah mengatakan berencana membuka kembali sekolah untuk perempuan setelah menetapkan syarat tertentu. Bennett mengatakan Dewan HAM PBB harus mengirim

pesan kuat pada Taliban.

“Perlakuan buruk pada perempuan tidak dapat ditoleransi dan dibenarkan dengan alasan apa pun, termasuk agama,” katanya.

“Dampak akumulatif pembatasan pada perempuan sangat menghancurkan dan berdampak lama pada seluruh populasi, dan sama saja dengan apartheid gender,” katanya.

Pada Desember lalu Taliban melarang sebagian besar perempuan bekerja di lembaga kemanusiaan. Banyak lembaga menghentikan sementara operasinya di Afghanistan yang sedang mengalami krisis kemanusiaan selama musim dingin. **tom**

## Sebanyak 46 Negara Miskin Minta Restrukturisasi Utang Luar Negeri

**TIMOR LESTE (IM)** - Sebanyak 46 negara miskin mengaku terbebani dampak pandemi covid-19, goncangan ekonomi global dan tingginya bunga utang luar negeri. Para pemimpin negara-negara tersebut dalam sebuah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara Kurang Berkembang atau LDC yang difasilitasi PBB di Doha, Qatar, menuntut restrukturisasi utang kepada negara-negara kaya. Negara-negara mendulang keuntungan lewat meminjamkan uang kepada 46 negara miskin.

Mereka telah menggelontorkan US\$185 miliar dalam bentuk hibah dan pinjaman murah pada 2021, demikian menurut Organisasi untuk Kerja sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Bantuan pembangunan resmi adalah salah satu pilar sistem keuangan internasional.

Lima dekade setelah klub negara-negara kurang berkembang ini didirikan oleh PBB untuk mengatur hak istimewa perdagangan dan akses yang lebih mudah mendapatkan bantuan keuangan, para anggotanya mengaku masih belum mampu merdeka dan himpitan dan jerat utang luar negeri.

Perubahan iklim, dampak covid-19, kenaikan harga makanan dan bahan bakar dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina serta bunga berjalan semakin membebani negara-negara miskin. Seluruh pemimpin yang menghadiri KTT tersebut menyalahkan sistem pinjaman utang luar negeri yang dibangun negara-negara Barat. Mereka menuntut perubahan sistem supaya negara miskin tidak terjerah oleh besarnya bunga berjalan dan tekanan lainnya.

“Kami menginginkan sesuatu yang mirip dengan konvensi iklim, pengakuan atas tanggung jawab yang dimiliki negara-negara kaya dalam sistem ekonomi yang tidak berkelanjutan yang kami miliki ini,” kata Nacpil. Pada konferensi iklim 2009, negara-negara kaya menjanjikan bantuan US\$100 miliar per tahun pada 2020 untuk membantu membayar kerusakan akibat kenaikan suhu.

“Kami menginginkan sesuatu yang mirip dengan konvensi iklim, pengakuan atas tanggung jawab yang dimiliki negara-negara kaya dalam sistem ekonomi yang tidak berkelanjutan yang kami miliki ini,” kata Nacpil.

Presiden Seychelles Wavel Ramkalawan mengatakan sudah waktunya bagi lembaga keuangan internasional tidak terpaku pada produk domestik bruto per kapita sebagai satu-satunya ukuran untuk pembangunan. “Satu ukuran selama ini tidak cocok untuk semua,” katanya.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menambahkan negara-negara kaya menguasai sistem keuangan global yang berorientasi pada keuntungan. Negara-negara miskin sebagai konsumen tetap utang luar negeri harus memberikan devisa untuk memenuhi tuntutan negara-negara kaya setiap tahunnya lewat pembayaran cicilan utang.

“Sistem keuangan global yang dirancang oleh negara-negara kaya, sebagian besar untuk keuntungan mereka. Tanpa cadangan uang tunai, negara-negara miskin dipaksa untuk membayar besaran suku bunga yang seperti predator,” ungkap Guterres.

Pandemi virus korona juga menjadi kesempatan negara-negara Barat untuk menguras kekayaan negara anggota LDC lewat penjualan vaksin.

Selain hanya dapat membelinya dengan jumlah terbatas, negara-negara miskin juga harus membayar cicilan dari pembelian vaksin selama beberapa tahun ke depan yang mengganggu fokus pemulihan ekonomi.

Organisai Program Pembangunan PBB (UNDP) memperkirakan 52 negara miskin menderita oleh tekanan utang dan menghadapi kemungkinan bahaya gagal bayar. Wakil Perdana Menteri Lesotho Nthomeng Majara termasuk di antara para pemimpin yang menyerukan penjadwalan ulang atau penghapusan utang.

Lidy Nacpil dari Asian Peoples Movement on Debt and Development mengatakan negara maju seharusnya setuju untuk memberikan kompensasi kepada negara miskin seperti dalam pembicaraan internasional tentang melawan perubahan iklim.

“Kami menginginkan sesuatu yang mirip dengan konvensi iklim, pengakuan atas tanggung jawab yang dimiliki negara-negara kaya dalam sistem ekonomi yang tidak berkelanjutan yang kami miliki ini,” kata Nacpil.

Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta. Pemerintah militer Myanmar tidak menanggapi tuduhan tersebut.

Sebelumnya militer membantah melakukan penyiksaan dan mengatakan korban jiwa merupakan gerilyawan pasukan bersenjata anti-pemerintah. Media daring yang mendukung militer mengungkapkan klaim serupa mengenai insiden di Sagaing atau menyatakannya sebagai hasil pertikaian antara faksi di kelompok perlawanan bersenjata. **tom**

Sejak diperkenalkan pada 2017, Pemerintah Filipina menerapkan program modernisasi jeepney dengan mewajibkan jeepney berusia 15 tahun ke atas harus diganti dengan kendaraan impor berbahan bakar diesel Euro 4 atau listrik, demi menurunkan tingkat emisi karbon di berbagai kota Filipina.

Sopir dan operator jeepney juga diharuskan membentuk koperasi atau korporasi dengan armada minimal 15 jeepney yang sudah dipermodern. Jika, tak mau mengikuti aturan ini, maka para sopir dan pemilik jeepney tak boleh beroperasi.

Situasi ini mendorong sopir dan pemilik jeepney menggelar mogok kerja karena menolak kebijakan yang dianggap tidak pro-kepada nasib mereka.

Pada hari pertama aksi mogok yang terjadi di Manila dan kota-kota sekitarnya itu Senin ini, 40.000 sopir jeepney menolak mengangkut penumpang, kata Mar Valbuena, kepala kelompok transportasi Manibela.

Untuk mencegah dampak buruk aksi ini, sejumlah sekolah dan kantor pemerintah serta swasta memutuskan beralih lewat sistem belajar dan kerja jarak jauh lewat internet. Calon penumpang lainnya beralih ke angkutan online, baik itu taks online maupun ojek online.

Pemerintah Filipina sendiri menawarkan tumpangan gratis di seluruh kota dan provinsi di negara ini. Sejumlah sopir jeepney sendiri masih mengangkut penumpang karena tak ingin kehilangan pendapatan.

Bagi beberapa calon penumpang lainnya, aksi mogok ini membuat mereka harus berlama-lama menunggu angkutan umum lainnya, seperti kendaraan roda tiga yang di Indonesia dikenal dengan bajaj.

Calon penumpang pun harus mengeluarkan uang yang jumlahnya dua kali lipat dibandingkan dengan menggunakan jeepney.

Ongkos menaiki jeepney bisa seharga 12 peson, tetapi tarif “bajaj” Filipina bisa dua kali lipatnya.

“Hari ini sulit sekali mendapatkan tumpangan, tetapi saya setuju dengan mogok kerja ini. Pemerintah tak boleh menyalahkannya karena penganggurannya terlalu mahal,” kata Jaime Maramag, pengemudi truk berusia 56 tahun yang harus menunggu angkutan umum selama 30 menit di Quezon City. **ans**



## PAMERAN PRODUK KONSUMEN INTERNASIONAL TIONGGOK

Anggota staf memeriksa pesawat bertema untuk mempersiapkan Pameran Produk Konsumen Internasional Tiongkok, di Bandara Internasional Meilan di Haikou, Provinsi Hainan, Tiongkok, Selasa (7/3). Pameran Produk Konsumen Internasional Tiongkok (CICPE) ketiga dijadwalkan akan dimulai pada pertengahan April di Provinsi Hainan, Tiongkok.